

DAFTAR ISI

Daftar Penyusun	
Kata Pengantar Kepala Bappenas	i
Kata Pengantar Tim Penyusun	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	viii

BAGIAN PERTAMA

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Manfaat.....	3
1.3. Tujuan dan Sasaran.....	3
1.4. Ruang Lingkup.....	4

Bab II KONDISI UMUM KAWASAN PERBATASAN ANTARNEGARA

2.1. Kawasan Perbatasan Darat	6
2.1.1. Kawasan Perbatasan Darat di Kalimantan	6
2.1.2. Kawasan Perbatasan di Papua	8
2.1.3. Kawasan Perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT)	10
2.2. Kawasan Perbatasan Laut	13

Bab III ISU DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN

3.1. Kebijakan Pembangunan	18
3.1.1. Kebijakan di masa lalu yang belum berpihak kepada kawasan-kawasan tertinggal dan terisolir.....	18
3.1.2. Belum adanya kebijakan dan strategi nasional pengembangan kawasan perbatasan	18
3.2. Ekonomi dan Sosial Budaya	19
3.2.1. Adanya paradigma "kawasan perbatasan sebagai halaman belakang"	19
3.2.2. Terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga	20
3.2.3. Sarana dan prasarana masih minim	20
3.2.4. Tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra-sejahtera	21
3.2.5. Terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan	22
3.2.6. Rendahnya kualitas SDM	22
3.2.7. Adanya aktivitas pelintas batas tradisional	22
3.2.8. Adanya tanah adat/ulayat masyarakat	23
3.3. Pertahanan dan Keamanan.....	23
3.3.1. Belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh	23
3.3.2. Terbatasnya jumlah aparat serta sarana dan prasarana	28
3.3.3. Terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum	29
3.3.4. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana perbatasan (PLB, PPLB, dan fasilitas CIQS)	29
3.4. Pengelolaan Sumber Daya Alam	30
3.4.1. Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam belum optimal	30
3.4.2. Terjadinya eksploitasi pemanfaatan Sumber Daya alam yang tak terkendali dan berkelanjutan	30
3.5. Kelembagaan dan Kewenangan Pengelolaan	31
3.5.1. Belum adanya kelembagaan yang mengelola kawasan perbatasan secara integral dan terpadu.....	31
3.5.2. Belum jelasnya kewenangan dalam pengelolaan kawasan Perbatasan	31

3.6. Kerjasama Antarnegara	32
3.6.1. Belum optimalnya keterkaitan pengelolaan perbatasan dengan kerjasama sub regional, maupun regional.....	32
3.6.2. Belum optimalnya kerjasama antarnegara dalam penanggulangan pelanggaran hukum di perbatasan	33
Bab IV UPAYA PENGELOLAAN SAAT INI	
4.1. Peraturan dan Perundangan	34
4.2. Bentuk Kelembagaan Perbatasan dan Kerjasama Ekonomi	36
Bab V KEBIJAKAN DAN STRATEGI UMUM PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN ANTARNEGARA	
5.1. Visi dan Misi Pengembangan Kawasan Perbatasan Antarnegara	40
5.2. Kebijakan Umum	42
5.2.1. Peningkatan keberpihakan terhadap kawasan perbatasan sebagai wilayah tertinggal dan terisolir dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang	43
5.2.2. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pintu gerbang internasional bagi kawasan Asia Pasifik	43
5.2.3. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan	44
5.2.4. Pengakuan terhadap hak adat/ulayat masyarakat	45
5.2.5. Penataan batas-batas negara dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	45
5.2.6. Peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan beserta sarana prasarananya	45
5.2.7. Peningkatan perlindungan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan kawasan konservasi	46
5.2.8. Peningkatan fungsi kelembagaan dan koordinasi antarinstansi terkait dalam pengelolaan kawasan perbatasan	46
5.2.9. Peningkatan kerjasama bilateral, sub-regional, maupun regional dalam berbagai bidang	47
5.3. Strategi Umum	47
5.3.1. Menyusun Kebijakan dan strategi nasional pengembangan kawasan perbatasan	48
5.3.2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan	49
5.3.3. Melakukan pemberdayaan masyarakat	49
5.3.4. Meningkatkan kualitas SDM	50
5.3.5. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah	50
5.3.6. Mengakomodasi dan mengatur hak adat/ulayat masyarakat kedalam regulasi dan peraturan yang berlaku	51
5.3.7. Menetapkan garis batas antarnegara melalui kesepakatan dengan negara tetangga sebelum tahun 2009	51
5.3.8. Meningkatkan pengawasan terhadap arus keluar-masuk manusia dan barang dari wilayah negara tetangga melalui PLB, PPLB, dan CIQS	52
5.3.9. Meningkatkan jumlah personel aparat dan penambahan sarana dan prasarana keamanan	52
5.3.10. Meningkatkan wawasan kebangsaan	53
5.3.11. Melakukan penegakan hukum secara adil dan tegas	53
5.3.12. Membentuk badan khusus pengelola kawasan perbatasan	54
5.3.13. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat	54

5.3.14. Sinkronisasi kewenangan pengelolaan dan peraturan	55
5.3.15. Melakukan kerjasama secara aktif dengan negara-negara tetangga dalam forum bilateral, sub-regional, dan regional	55
Bab VI	
PENUTUP	56
<u>BAGIAN KEDUA</u>	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kawasan Perbatasan Darat di Indonesia	57
1.2. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi Pengembangan	58
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DARAT DI KALIMANTAN	
2.1. Profil Kawasan Perbatasan Kalimantan	61
2.1.1. Perbatasan di Kalimantan Barat	62
2.1.2. Perbatasan di Kalimantan Timur	65
2.2. Isu dan Permasalahan Perbatasan Darat Kalimantan	69
2.3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Kontinen Kalimantan	74
2.4. Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan	79
2.5. Program	84
2.6. Indikator Kinerja Program	87
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN DARAT DI PAPUA	
3.1. Profil Kawasan Perbatasan Darat di Papua	90
3.2. Isu dan Permasalahan Kawasan Perbatasan Papua	102
3.3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Papua	107
3.4. Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Papua	114
3.5. Program-Program Pengembangan Kawasan Perbatasan Papua	119
3.6. Indikator Kinerja Program	121
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN DARAT DI NUSA TENGGARA TIMUR	
4.1. Karakteristik Wilayah	123
4.2. Profil Kawasan Perbatasan Kontinen NTT	124
4.2.1. Geografi dan Administrasi	125
4.2.2. Topografi	128
4.2.3. Sosial Budaya	128
4.2.4. Potensi Wilayah	139
4.3. Permasalahan di Kawasan Perbatasan	130
4.4. Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Kontinen di NTT	136
4.5. Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan	146
4.6. Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat di NTT	151
4.7. Indikator Kinerja Program	155
Bab V KELEMBAGAAN PENGELOLA PERBATASAN DARAT	
5.1. Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Darat	157
5.1.1. Peran Pemerintah Pusat	158
5.1.2. Peran Pemerintah Provinsi	158
5.1.3. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota	159
5.1.4. Investasi Dunia Usaha/Swasta	160
5.1.5. Peran Serta Masyarakat	160
Bab VI PENUTUP	161

BAGIAN KETIGA

Bab I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	162
1.2. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Laut	165

Bab II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN LAUT

2.3. Profil Batas Laut.....	167
2.3.1. Batas Laut Teritorial.....	168
2.3.2. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	169
2.3.3. Batas Landas Kontinen.....	171
2.3.4. Batas Zona Tambahan.....	173
2.3.5. Zona Perikanan Khusus (Special Fisheries Zones).....	174
2.4. Profil Pulau-Pulau Terluar	174
2.5. Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan Laut.....	181
2.5.1. Potensi Sumberdaya Alam.....	182
2.5.1.1. Sumberdaya Alam Dapat Pulih (Renewable Resources)	182
2.5.1.2. Sumberdaya Alam Tidak Dapat Pulih (Non Renewable Resources).....	185
2.5.2. Potensi Sumberdaya Manusia.....	186
2.5.3. Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan Laut.....	186
2.5.3.1. Posisi Strategis Kawasan Perbatasan Laut	186
2.5.3.2. Peluang Kerjasama Luar Negri.....	188
2.5.3.3. Peluang Perdagangan dan Pengembangan Ekonomi	189
2.5.3.4. Peluang Pengembangan Perikanan.....	191
2.6. Permasalahan Pengembangan Kawasan Perbatasan Laut.....	195
2.6.1. Gambaran Umum.....	195
2.6.2. Isu dan Permasalahan.....	196
2.7. Kebijakan Pengembangan.....	199
2.7.1. Dasar Pertimbangan.....	199
2.7.2. Kebijakan Pengembangan.....	201
2.7.2.1. Kebijakan Ditinjau dari Aspek Ekonomi	201
2.7.2.2. Kebijakan Ditinjau dari Aspek Hankam.....	202
2.7.2.3. Kebijakan Ditinjau dari Aspek Pengembangan SDM	203
2.7.2.4. Kebijakan Ditinjau dari Aspek Kelestarian Lingkungan Laut dan Pesisir.....	204
2.8. Strategi Pengembangan.....	204
2.8.1. Strategi Dasar.....	204
2.8.2. Strategi Khusus.....	205
2.8.2.1. Strategis Khusus Bidang Ekonomi.....	205
2.8.2.2. Strategi Khusus Bidang Pertahanan Keamanan dan Prasarana.....	208
2.8.2.3. Strategi Khusus Bidang Pengembangan SDM	209
2.8.2.4. Strategi Khusus Bidang Kelestarian Laut dan Pesisir.....	211
2.9. Program Pengembangan Pulau-Pulau Terluar.....	212

Bab III PELAKSANAAN DAN KELEMBAGAAN

3.7. Peran Pemerintah Pusat.	216
3.8. Peran Pemerintah Provinsi.	217
3.9. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota.....	218
3.10. Investasi Dunia Usaha/Swasta.....	219
3.11. Peran Serta Masyarakat	219

Bab IV PENUTUP.....	220
---------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN